

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi ini setiap daerah dituntut untuk melakukan segala urusan pemerintahan di daerahnya sendiri termasuk Pemerintah Kota Parepare, hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah memberikan tanggung jawab kepada daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, dan tentunya untuk pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dengan otonomi daerah setiap bagian dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap pengelolaan tersebut.

Akuntabilitas sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan. Akuntabilitas memegang erat prinsip transparansi, kejujuran, dan objektivitas terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan akuntabilitas, diperlukan keterbukaan atau transparansi pemerintah dalam merinci semua pengeluaran serta pemasukan yang dilakukan selama tahun anggaran. Semakin mudahnya suatu laporan diakses dan dipahami oleh penggunanya maka semakin baik pula suatu daerah dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, dibutuhkan juga standar kinerja untuk mengukur kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan partisipasi dalam

menciptakan pelayanan masyarakat dalam bentuk penyajian laporan keuangan dan pelayanan dalam masyarakat.

Syarat terbentuknya akuntabilitas salah satunya yaitu dengan adanya transparansi terhadap keuangan daerah baik pemasukan maupun pengeluaran pemerintah dalam membiayai kegiatan dalam pelayanan masyarakat. Berbicara mengenai keuangan daerah tentunya akan menghasilkan informasi keuangan yang penyusunan informasi keuangan tidak akan lepas dari akuntansi. Akuntansi merupakan serangkaian aktivitas mulai dari pengukuran, penjabaran sampai menghasilkan informasi keuangan atau sering disebut laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah baik secara vertikal atau pelaporan kepada atasan termasuk pemerintah pusat maupun horizontal atau kepada DPRD, rakyat atau pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.

Akuntansi dianggap sebagai alat untuk mengontrol dan mengevaluasi segala aktivitas pemerintah dalam pelayanan untuk kepentingan rakyat dan alat ukur terhadap keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tujuannya serta sebagai alat pertanggungjawaban keuangan. Melihat pentingnya peran akuntansi sehingga dalam penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada sifat yang jujur dan penuh tanggung jawab apalagi sebagai seorang muslim harus menjunjung tinggi sifat-sifat tersebut yang juga merupakan sifat-sifat yang dicontohkan oleh nabi besar Muhammad saw yang menjadi teladan setiap umat muslim. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan daerah juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi prinsip pertanggungjawaban prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

Dasar penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada sifat adil, jujur, dan amanah sesuai dengan ciri khas dari akuntansi berprinsip syariah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Akuntansi berprinsip syariah juga sangat menekankan transparansi dalam pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia dan akuntabilitas yang mencerminkan sifat tauhid, dimana segala aktifitas ekonomi sesuai dengan syariah-syariah islam.

Penerapan akuntansi yang baik juga dibutuhkan karena dengan penerapan sistem akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap tepat tidaknya dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang tentunya setiap daerah harus berfokus pada standar ini. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat adanya transaksi yang dilakukan.¹ Adapun standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fenomena yang berkembang saat ini berkaitan dengan persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa keuangan daerah sangat muda dikorupsi oleh pemerintah daerah. Menurut mereka, segala anggaran yang dianggarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan atau sebuah proyek tidak hanya untuk membiayai proyek tersebut namun juga dipakai untuk kepentingan pribadi. Apalagi banyak kasus korupsi yang sedang marak terjadi di Indonesia, dimana mayoritas dilakukan oleh pejabat negara seperti contohnya kasus korupsi pada wisma atlet hambalang. Oleh

¹ Lily, 'Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,' *Jom FEKON* 2, no. 2, 2015, h. 2.

karena itu, untuk mematahkan persepsi tersebut dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi.

Tuntutan terhadap akuntabilitas laporan keuangan sehingga pengelolaan laporan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Hal ini menyebabkan daerah harus memperbaiki dan mengevaluasi proses pencatatan dan pelaporannya. Oleh karena itu, Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Parepare dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik yang diharapkan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat, relevan dan akurat sehingga dapat mewujudkan transparansi yang nantinya akan menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan sebagai tujuan dari reformasi keuangan daerah.

Namun, publikasi laporan keuangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas suatu pelaporan masih dianggap belum maksimal di berbagai daerah. Saat ini, masih sedikit sulit dalam mengakses laporan keuangan secara utuh, dikarenakan ada informasi-informasi keuangan yang masih tidak tersedia atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga menyebabkan kurang terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Untuk Pemerintah kota Parepare telah menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun untuk mengakses laporan keuangan secara utuh masih sedikit sulit, hal ini dikarenakan yang dipublikasi sebagai besar hanya berupa pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan yang dilakukan pemerintah sedangkan untuk laporan Neraca, Arus Kas dan lainnya masih sulit untuk diakses. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan mampu menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang nantinya

akan mendorong transparansi dilakukan secara efektif sehingga mewujudkan akuntabilitas secara efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Kota Parepare ?
2. Bagaimana Pencapaian Keuangan Kota Parepare ?
3. Bagaimana Transparansi dan Standar Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Kota Parepare menurut prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Pengelolaan Keuangan Kota Parepare
2. Menjelaskan Pencapaian Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare
3. Menjelaskan Transparansi dan Standar Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Kota Parepare menurut prinsip syariah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi secara teoritis dalam penelitian selanjutnya

baik untuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare maupun masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri,

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat untuk Institut Agama Islam Negeri Parepare terkhusus untuk fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah untuk memberikan referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas standar akuntansi pemerintah.

b. Bagi Masyarakat,

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk masyarakat dalam memperbaiki persepsi mereka akan pengelolaan keuangan daerah dan juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.

c. Bagi Peneliti,

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang akuntabilitas standar akuntansi pemerintah.